



---

## SEJARAH PENDIDIKAN INDONESIA: SEBUAH REFLEKSI

### *HISTORY OF INDONESIAN EDUCATION: A REFLECTION*

**Ahmad Subair**

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email : [ahmadsubair29@outlook.com](mailto:ahmadsubair29@outlook.com)

---

#### Article Info

Article history :

Received : 28-09-2024

Revised : 02-10-2024

Accepted : 04-10-2024

Published : 06-10-2024

#### Abstract

*This article discusses various educational problems in Indonesia in the past with a focus on aspects such as limited access to education, social class, gender, geography, unequal quality of education, facilities, teaching staff, curriculum, rigid educational orientation, evaluation-oriented memorization, the relevance of education to the world of work, as well as ethnic and religious discrimination. This research aims to analyze how these factors influence the development of education in Indonesia, as well as their impact on equal distribution of learning opportunities and human resource development. During the colonial period, access to education was limited to certain elites, creating inequality that continued until after independence. Apart from that, a curriculum that is too rigid and irrelevant to the needs of the world of work causes graduates to be unprepared to face market challenges. Ethnic and religious-based discrimination also exacerbates the situation, creating a non-inclusive education system. This article concludes that these problems still leave traces today and require more comprehensive and inclusive policy reform. Reflection on the history of Indonesian education is very important to improve the education system and create fairer opportunities for all of society.*

**Keywords : Indonesian education, history of education, educational problems**

---

#### Abstrak

Artikel ini membahas berbagai masalah pendidikan di Indonesia pada masa lalu dengan fokus pada aspek-aspek seperti akses pendidikan yang terbatas, kelas sosial, gender, geografi, kualitas pendidikan yang tidak merata, fasilitas, tenaga pengajar, kurikulum, orientasi pendidikan yang kaku, evaluasi berorientasi hafalan, relevansi pendidikan dengan dunia kerja, serta diskriminasi etnis dan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi perkembangan pendidikan di Indonesia, serta dampaknya terhadap pemerataan kesempatan belajar dan pembangunan sumber daya manusia. Pada masa kolonial, akses pendidikan dibatasi hanya untuk elite tertentu, menciptakan ketimpangan yang terus berlanjut hingga setelah kemerdekaan. Selain itu, kurikulum yang terlalu kaku dan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja menyebabkan lulusan tidak siap menghadapi tantangan pasar. Diskriminasi berbasis etnis dan agama juga memperparah situasi, menciptakan sistem pendidikan yang tidak inklusif. Artikel ini menyimpulkan bahwa masalah-masalah tersebut masih meninggalkan jejak hingga saat ini dan memerlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif. Refleksi terhadap sejarah pendidikan Indonesia sangat penting untuk memperbaiki sistem pendidikan dan menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh masyarakat.

**Kata Kunci : Pendidikan Indonesia, sejarah pendidikan, masalah pendidikan**



## PENDAHULUAN

Sejarah pendidikan di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang berakar dari era kolonialisme hingga masa kini, di mana berbagai kebijakan dan sistem pendidikan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendidikan, sebagai salah satu sektor krusial dalam pembangunan nasional, memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing tinggi. Namun, pendidikan Indonesia juga menghadapi tantangan yang kompleks, baik di masa lalu maupun sekarang (Purnamasari, 2016).

Pada masa kolonial Belanda, pendidikan di Indonesia dibentuk untuk kepentingan kolonial, di mana hanya segelintir elite pribumi yang mendapatkan kesempatan untuk mengakses pendidikan formal. Pendidikan lebih diarahkan untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan kolonial, tanpa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat pribumi secara umum. Akses yang terbatas ini menimbulkan kesenjangan pendidikan yang signifikan antar-kelompok pribumi dan kaum kolonial, serta antara kelas sosial yang lebih tinggi dan masyarakat umum (Sultani & Kristanti, 2020).

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pendidikan menjadi prioritas utama dalam upaya membangun bangsa yang baru merdeka. Semangat mencerdaskan kehidupan bangsa, seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, menjadi fondasi dari sistem pendidikan nasional. Pada era ini, pemerintah berusaha memperluas akses pendidikan dengan memperkenalkan sekolah-sekolah dasar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, meski ada upaya untuk memperluas akses, tantangan lain muncul dalam hal kualitas pendidikan. Keterbatasan tenaga pengajar, sarana prasarana yang minim, serta ketidakmerataan distribusi pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menjadi masalah yang terus dihadapi (Muhardi, 2004).

Seiring dengan berjalannya waktu, pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan kebijakan dan kurikulum. Pada era Orde Baru, pendidikan diatur secara lebih sentralistik, dengan kurikulum yang lebih terarah dan terstruktur. Pemerintah Orde Baru menekankan pendidikan sebagai alat untuk menanamkan ideologi negara dan membangun rasa nasionalisme. Namun, di balik keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan, terdapat berbagai masalah lain seperti kebebasan akademik yang terbatas dan kurangnya inovasi dalam metode pengajaran (Landong, n.d.).

Ketika Reformasi bergulir pada tahun 1998, sistem pendidikan di Indonesia kembali mengalami perubahan. Desentralisasi pendidikan diharapkan mampu memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah untuk mengelola pendidikan mereka. Pada era ini, pendidikan diharapkan dapat lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, desentralisasi ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah-daerah maju dan daerah tertinggal, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola pendidikan di tingkat lokal (Ishaq, 2006).



Selain itu, gap pendidikan antar generasi juga tampak jelas di Indonesia. Pada generasi terdahulu, pendidikan lebih difokuskan pada aspek-aspek kognitif dengan pendekatan yang cenderung bersifat satu arah. Guru dianggap sebagai sumber utama pengetahuan, sementara siswa diposisikan sebagai penerima pasif. Hal ini berbeda dengan tren pendidikan saat ini, di mana pendekatan yang lebih interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi mulai diterapkan. Meskipun demikian, kesenjangan teknologi dan akses ke internet antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah yang mencolok (Tantowi, 2022).

Pendidikan di era digital, yang saat ini terus berkembang dengan pesat, membawa perubahan signifikan pada metode pengajaran dan cara belajar. Penggunaan teknologi dalam pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi membuka peluang yang lebih luas bagi para siswa untuk mendapatkan akses ke berbagai sumber pengetahuan. Namun, gap digital ini menjadi masalah baru di dunia pendidikan, terutama bagi daerah-daerah terpencil yang belum sepenuhnya terjangkau oleh infrastruktur teknologi (Ambarwati, Et.al, 2021).

Selain itu, tantangan terkait dengan kurikulum juga menjadi masalah yang terus dibicarakan. Kurikulum di Indonesia sering kali mengalami perubahan yang cukup drastis, yang tidak hanya membingungkan para guru dan siswa, tetapi juga menimbulkan kesenjangan dalam implementasinya. Kurikulum 2013, misalnya, yang diharapkan mampu menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Banyak guru yang mengeluhkan kurangnya pelatihan yang memadai terkait kurikulum baru, serta minimnya fasilitas yang mendukung proses belajar-mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum tersebut (Lie, 2015).

Lebih jauh lagi, salah satu gap pendidikan yang mendasar adalah kualitas guru. Di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi, masih banyak guru yang belum mencapai standar kompetensi yang diharapkan. Ketimpangan kualitas guru antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi tantangan tersendiri. Guru-guru di daerah terpencil sering kali tidak mendapatkan akses pelatihan yang memadai, serta harus menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas dalam menjalankan tugas mereka.

Di sisi lain, masalah pendanaan pendidikan juga menjadi perhatian utama dalam sejarah pendidikan Indonesia. Meskipun anggaran pendidikan terus meningkat, dengan alokasi 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), efektivitas penggunaan anggaran tersebut sering kali dipertanyakan. Banyak sekolah di daerah-daerah terpencil yang masih kekurangan fasilitas dasar, seperti gedung yang layak, buku-buku pelajaran, dan alat-alat penunjang pendidikan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya gap dalam distribusi anggaran pendidikan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang tertinggal.

Ketimpangan pendidikan juga terlihat pada akses terhadap pendidikan tinggi. Meskipun semakin banyak universitas dan perguruan tinggi yang berdiri di Indonesia, akses untuk masuk ke perguruan tinggi favorit masih didominasi oleh siswa dari keluarga yang lebih mampu secara



ekonomi. Sistem seleksi masuk perguruan tinggi yang berbasis tes juga sering dianggap lebih menguntungkan siswa yang berasal dari sekolah-sekolah dengan kualitas pendidikan yang lebih baik, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini menciptakan kesenjangan yang semakin melebar antara kelompok sosial-ekonomi yang berbeda.

Sebagai tambahan, isu pendidikan vokasional juga menjadi sorotan dalam refleksi historis ini. Pendidikan vokasional di Indonesia, yang diharapkan mampu mencetak tenaga kerja terampil dan siap pakai, sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup dari pemerintah dan masyarakat. Banyak siswa yang masih memandang rendah pendidikan vokasional dibandingkan dengan pendidikan akademik, padahal di era modern ini, keterampilan praktis dan teknis sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Gap antara kebutuhan industri dan kualitas lulusan pendidikan vokasional menjadi salah satu masalah besar yang harus diatasi (Nata et al., n.d.).

Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, pendidikan di Indonesia juga dihadapkan pada tantangan dalam menyiapkan generasi yang mampu bersaing di kancah global. Namun, pendidikan yang berorientasi pada pasar global ini sering kali tidak diimbangi dengan pelestarian nilai-nilai lokal dan budaya nasional. Pendidikan yang terlalu berfokus pada aspek kognitif dan keterampilan teknis tanpa memperhatikan aspek karakter dan moralitas juga menjadi salah satu kritik utama terhadap sistem pendidikan Indonesia saat ini (Hidayat, 2021).

Dalam perjalanannya, pendidikan Indonesia telah melalui berbagai fase perubahan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Dari era kolonial hingga era digital, tantangan yang dihadapi terus berubah, namun beberapa masalah seperti kesenjangan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan tetap menjadi isu yang relevan. Refleksi historis ini menunjukkan bahwa untuk mencapai sistem pendidikan yang lebih baik, diperlukan upaya berkelanjutan dalam mengatasi gap masalah pendidikan dari masa ke masa. Pemerintah, masyarakat, dan semua pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dalam penelitian ini menguraikan gap pendidikan yang terjadi di setiap masanya dalam sejarah Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian sejarah memiliki tujuan utama untuk memahami dan menganalisis peristiwa masa lalu secara kritis dan objektif. Metode ini tidak hanya berfokus pada narasi atau cerita kronologis, tetapi juga menekankan pada pencarian makna dari peristiwa tersebut, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dan relevansinya terhadap masa kini. Dalam konteks pendidikan, metode penelitian sejarah sangat penting untuk mengeksplorasi dinamika perubahan kebijakan, sistem, dan praktik pendidikan dari masa ke masa (Sukmana, 2021).



Metode penelitian sejarah terdiri dari beberapa tahapan yang melibatkan pengumpulan data, kritik sumber, interpretasi, dan penulisan hasil penelitian. Tahapan pertama dalam penelitian sejarah adalah heuristik, yaitu pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik yang diteliti. Sumber-sumber ini bisa berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah data asli yang dihasilkan pada periode yang sedang diteliti, seperti dokumen resmi, surat, catatan harian, arsip pemerintah, atau catatan media masa. Sedangkan sumber sekunder adalah karya-karya yang ditulis oleh peneliti lain berdasarkan sumber primer, seperti buku sejarah, artikel jurnal, dan ulasan (Wasino & Endah Sri, 2018).

Setelah proses heuristik, langkah berikutnya adalah kritik sumber, yang dibagi menjadi dua: kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern bertujuan untuk menilai keaslian atau otentisitas sumber sejarah yang dikumpulkan. Apakah dokumen atau artefak tersebut benar-benar berasal dari periode yang dimaksud? Apakah dokumen tersebut masih dalam kondisi yang tidak berubah sejak ditemukan? Kritik ekstern ini penting untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan tidak palsu atau terdistorsi.

Sementara itu, kritik intern bertujuan untuk menganalisis isi dari sumber sejarah tersebut. Peneliti harus menilai keakuratan informasi dalam sumber dan mencari tahu apakah terdapat bias atau pandangan subjektif dari penulis aslinya. Proses ini menuntut peneliti untuk bersikap kritis terhadap data yang diperoleh dan tidak menerima informasi secara mentah. Kritik intern memungkinkan peneliti untuk menemukan makna di balik teks dan melihat bagaimana konteks sosial, politik, dan budaya mempengaruhi pembuatan sumber tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah interpretasi, yaitu memahami dan menjelaskan peristiwa sejarah berdasarkan sumber-sumber yang telah dikumpulkan dan dikritisi. Interpretasi ini harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan bukti-bukti yang valid, sehingga peneliti dapat menghindari kesalahan penafsiran atau kesimpulan yang tidak tepat. Pada tahap ini, peneliti juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa sejarah, seperti struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada pada waktu itu.

Langkah terakhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian sejarah dalam bentuk narasi yang runtut dan analitis. Dalam historiografi, peneliti menyajikan temuan-temuan mereka dengan cara yang sistematis, menjelaskan hubungan sebab-akibat dari peristiwa yang diteliti, serta menunjukkan dampaknya terhadap perkembangan selanjutnya. Penulisan ini tidak hanya menyajikan fakta-fakta, tetapi juga analisis mendalam tentang makna dan signifikansi dari peristiwa-peristiwa tersebut.

Melalui tahapan-tahapan ini, metode penelitian sejarah memungkinkan peneliti untuk menggali peristiwa masa lalu secara kritis, sehingga dapat memahami lebih baik bagaimana sejarah membentuk pendidikan di Indonesia. Penelitian sejarah juga memberikan landasan penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan zaman.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah pendidikan di Indonesia menghadirkan banyak masalah yang menjadi hambatan serius bagi pembangunan pendidikan yang merata dan inklusif. Berbagai faktor seperti akses pendidikan yang terbatas, perbedaan kelas sosial, ketidaksetaraan gender, geografi, dan masalah dalam kualitas pendidikan menjadi isu utama yang telah berlangsung sejak masa kolonial hingga era modern. Untuk lebih memahami kompleksitas masalah ini, analisis terhadap setiap aspek diperlukan (Mardizal & Ramatni, 2024).

Akses pendidikan yang terbatas menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia pada masa lalu, terutama pada era kolonial. Sistem pendidikan yang diterapkan Belanda dirancang untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja administratif kolonial dan hanya sedikit pribumi yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal. Hanya kalangan elit pribumi yang mendapat hak untuk belajar di sekolah-sekolah Eropa atau sekolah Belanda seperti HIS (Hollandsch-Inlandsche School) dan MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Akses ini semakin sempit dengan adanya diskriminasi yang kuat berdasarkan status sosial dan ekonomi, sehingga pendidikan lebih berfungsi sebagai alat penegakan status sosial daripada sebagai sarana untuk membangun bangsa yang cerdas dan merdeka (Prayudi & Salindri, 2015).

Pasca-kemerdekaan, meskipun akses pendidikan mulai terbuka untuk lebih banyak kalangan, daerah-daerah terpencil masih menghadapi tantangan besar dalam hal penyediaan sekolah. Banyak wilayah pedesaan yang tidak memiliki sekolah yang memadai, sehingga anak-anak di wilayah tersebut sulit mendapatkan akses pendidikan, terutama pada jenjang yang lebih tinggi seperti sekolah menengah dan perguruan tinggi.

Kelas sosial memainkan peran besar dalam menentukan siapa yang dapat mengakses pendidikan di masa lalu. Seperti disebutkan sebelumnya, pada masa kolonial, hanya segelintir elite yang memiliki akses ke sekolah-sekolah berkualitas, sedangkan masyarakat umum, terutama dari kalangan bawah, tidak memiliki peluang yang sama. Perbedaan ini tidak hanya terjadi di tingkat dasar dan menengah, tetapi juga pada pendidikan tinggi, di mana akses ke universitas hanya terbuka bagi mereka yang memiliki latar belakang sosial-ekonomi yang kuat (Tuahuns, n.d.).

Pasca-kemerdekaan, ketimpangan kelas sosial dalam pendidikan tetap menjadi isu penting. Banyak anak dari keluarga miskin harus putus sekolah karena keterbatasan biaya, sedangkan anak-anak dari keluarga kaya memiliki akses yang lebih baik ke pendidikan berkualitas, termasuk ke sekolah-sekolah swasta yang menawarkan fasilitas dan pengajaran yang lebih baik (Stamboel, 2013).

Isu gender juga menjadi masalah signifikan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Pada masa kolonial, pendidikan untuk perempuan sangat terbatas. Sekolah-sekolah yang ada lebih banyak ditujukan untuk laki-laki, dengan asumsi bahwa perempuan tidak perlu memperoleh pendidikan tinggi karena peran utama mereka adalah sebagai ibu rumah tangga. Pemikiran patriark ini menciptakan kesenjangan besar dalam akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Baru





setelah kemerdekaan, muncul gerakan-gerakan yang mulai memperjuangkan hak perempuan untuk mendapatkan akses yang setara dalam pendidikan. Meski begitu, di beberapa daerah, kesenjangan gender dalam pendidikan masih tampak jelas, terutama di wilayah pedesaan dan daerah-daerah dengan norma budaya yang lebih konservatif (Hadi & Nisa, 2023).

Geografi Indonesia yang sangat beragam dengan ribuan pulau dan daerah terpencil telah menjadi salah satu tantangan utama dalam pemerataan pendidikan. Daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau kota besar sering kali diabaikan dalam penyediaan fasilitas pendidikan. Banyak anak-anak di pedesaan harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah terdekat, sementara di beberapa wilayah terpencil, akses ke sekolah dasar sekalipun sangat sulit. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan besar dalam pendidikan, di mana anak-anak di daerah perkotaan cenderung mendapatkan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan anak-anak di daerah terpencil (Susiana, 2015).

Kualitas pendidikan di Indonesia pada masa lalu sangat bervariasi tergantung pada lokasi, status sosial, dan latar belakang ekonomi. Sekolah-sekolah di kota-kota besar atau yang didirikan oleh pemerintah kolonial biasanya memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah-sekolah di pedesaan. Kurikulum, metode pengajaran, serta fasilitas di sekolah-sekolah kota lebih berkembang, sedangkan sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan tenaga pengajar yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai (Baidhawry, 2005).

Masalah ketidakmerataan kualitas pendidikan ini terus berlanjut setelah Indonesia merdeka, dengan daerah-daerah terpencil dan tertinggal yang masih kesulitan untuk mendapatkan tenaga pengajar yang berkualitas, fasilitas belajar yang baik, serta akses ke buku-buku dan sumber belajar lainnya.

Masalah fasilitas pendidikan sangat menonjol dalam sejarah pendidikan Indonesia. Di banyak daerah, terutama di luar Jawa dan di pedesaan, sekolah-sekolah sering kali tidak memiliki bangunan yang layak, apalagi sarana penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, atau alat-alat peraga. Bahkan hingga sekarang, ada sekolah-sekolah yang masih menggunakan bangunan yang rusak, dengan kelas yang padat dan minimnya bahan ajar.

Pada masa lalu, masalah fasilitas ini juga diperparah dengan keterbatasan buku pelajaran dan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Di banyak daerah, anak-anak terpaksa belajar tanpa adanya bahan ajar yang memadai, yang tentu saja berpengaruh pada kualitas pendidikan mereka.

Guru merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pendidikan, namun sejarah menunjukkan bahwa kualitas dan distribusi guru di Indonesia sangat tidak merata. Pada masa kolonial, hanya sedikit pribumi yang diizinkan menjadi guru, sementara setelah kemerdekaan, Indonesia menghadapi kekurangan guru yang kompeten, terutama di daerah-daerah terpencil. Guru-guru di daerah tersebut sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai, dan dalam banyak kasus, tidak memiliki kualifikasi formal yang cukup (Sewang, 2015).



Selain itu, masalah kesejahteraan guru juga menjadi isu penting. Banyak guru yang digaji rendah dan harus bekerja dalam kondisi yang sulit, terutama di daerah terpencil. Hal ini tentu mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka, yang pada gilirannya berdampak pada kualitas pendidikan yang mereka berikan.

Kurikulum pendidikan di masa lalu sering kali dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel. Pada masa kolonial, kurikulum dirancang lebih untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial, dengan fokus pada administrasi dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk tenaga kerja. Setelah kemerdekaan, kurikulum diubah untuk mencerminkan nilai-nilai nasionalisme dan pembangunan bangsa. Namun, banyak yang berpendapat bahwa kurikulum di Indonesia, terutama pada era Orde Baru, terlalu terpusat dan tidak memberikan ruang untuk kreativitas dan inovasi dalam pengajaran (Mubarok, 2019).

Kurikulum yang ada lebih berorientasi pada hafalan dan pengulangan, dengan sedikit perhatian pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Hal ini membuat siswa lebih pasif dan hanya fokus pada mendapatkan nilai bagus dalam tes, tanpa benar-benar memahami materi yang diajarkan.

Orientasi pendidikan pada masa lalu sangat berfokus pada aspek-aspek kognitif, terutama kemampuan untuk menghafal informasi. Metode pengajaran yang digunakan di sekolah-sekolah lebih bersifat satu arah, di mana guru adalah sumber utama pengetahuan dan siswa hanya menerima informasi tanpa ruang untuk berdebat atau berinovasi. Model ini menciptakan generasi siswa yang lebih terfokus pada pencapaian nilai akademik, namun kurang dilatih dalam berpikir kritis, kreatif, dan solutif.

Sistem evaluasi di sekolah-sekolah Indonesia pada masa lalu sangat bergantung pada ujian yang berorientasi pada hafalan. Siswa diharuskan untuk menghafal fakta-fakta dan informasi tanpa benar-benar memahami konsep yang mendasarinya. Tes ini lebih mengukur kemampuan siswa dalam mengingat informasi daripada kemampuan untuk menganalisis atau menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Model evaluasi seperti ini cenderung mereduksi esensi dari pendidikan itu sendiri, yang seharusnya membantu siswa untuk berkembang secara intelektual dan sosial.

Salah satu kritik terbesar terhadap pendidikan di masa lalu adalah kurangnya relevansi antara pendidikan yang diterima siswa dengan kebutuhan dunia kerja. Sistem pendidikan yang ada tidak mampu menyiapkan lulusan yang siap terjun ke dunia industri atau pekerjaan. Banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterampilan yang mereka pelajari di sekolah tidak sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Hal ini menciptakan kesenjangan besar antara dunia pendidikan dan dunia kerja, yang masih terasa hingga saat ini (Mesra & Salem, 2023).

Diskriminasi etnis dan agama juga menjadi bagian dari sejarah pendidikan di Indonesia. Pada masa kolonial, sistem pendidikan yang ada memprioritaskan orang-orang Eropa dan keturunan Tionghoa, sementara pribumi sering kali diabaikan atau hanya diberi akses pendidikan





dasar yang sangat terbatas. Setelah kemerdekaan, diskriminasi berdasarkan etnis dan agama masih terlihat dalam beberapa bentuk, baik dalam akses pendidikan maupun dalam kurikulum yang diajarkan. Pada masa Orde Baru, ada kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung keragaman budaya dan agama, dan ini tercermin dalam sistem pendidikan yang cenderung

## **KESIMPULAN**

Pendidikan di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan dari masa ke masa. Pada masa lalu, akses pendidikan sangat terbatas, baik karena faktor kelas sosial, gender, maupun geografi. Hanya kelompok elite yang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, sementara masyarakat umum, terutama di daerah terpencil, terpinggirkan. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan yang berdampak panjang terhadap pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Ketidakadilan dalam hal fasilitas, tenaga pengajar, dan kurikulum juga memperburuk kondisi tersebut, sehingga pendidikan menjadi alat yang lebih memperkuat perbedaan sosial ketimbang menjembatani kesenjangan yang ada.

Selain itu, masalah orientasi pendidikan di masa lalu yang terlalu kaku dan berfokus pada hafalan serta tes yang berorientasi pada kemampuan mengingat, menjauhkan siswa dari kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kurikulum yang terlalu sentralistik dan tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja mengakibatkan lulusan yang tidak siap menghadapi tantangan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan tidak memberikan ruang bagi pengembangan potensi individu secara optimal dan kurang memberikan solusi terhadap tuntutan sosial dan ekonomi yang terus berubah.

Terakhir, diskriminasi berbasis etnis dan agama dalam pendidikan di masa lalu menambah kerumitan masalah pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan kolonial yang bias, serta kebijakan pasca-kemerdekaan yang kurang mendukung keragaman, telah menciptakan lingkungan yang tidak inklusif. Meskipun sudah banyak kemajuan dalam akses dan kesempatan pendidikan, jejak-jejak masalah di masa lalu masih terasa hingga kini. Oleh karena itu, refleksi terhadap sejarah pendidikan Indonesia sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan relevan dengan tantangan global di masa depan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambarwati, D., Wibowo, U. B., Arsyiadanti, H., & Susanti, S. (2021). Studi literatur: Peran inovasi pendidikan pada pembelajaran berbasis teknologi digital. *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 8(2), 173–184.
- Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan agama berwawasan Multikultural*. Erlangga.
- Hadi, Y. N., & Nisa, N. A. K. (2023). Polemik Pendidikan Indonesia Masa Kini. *Edited by Yusron Nur Hadi. Sukolilo Pati Jawa Tengah: Fatiha Media (Sukolilo. Available at:*
- Hidayat, U. S. (2021). *Urgensi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Menyiapkan Generasi*



- Emas 2045: Strategi Membangun Generasi Cerdas, Berkarakter dan Berdaya Saing di Abad 21*. Nusa Putra Press.
- Ishaq, I. (2006). *Membangun visi bersama: Aspek-aspek penting dalam reformasi pendidikan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Landong, A. (n.d.). *Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar-Jejak Pustaka*. Jejak Pustaka.
- Lie, A. (2015). *Pendidikan: antara kebijakan dan praksis*. Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Mardizal, J., & Ramatni, A. (2024). *Sosiologi Pendidikan*. Jonni Mardizal.
- Mesra, R., & Salem, V. E. T. (2023). *Pengembangan Kurikulum*.
- Mubarok, M. Z. (2019). *Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Perspektif Masyarakat Madani Era Reformasi Di Indonesia*.
- Muhardi, M. (2004). *Kontribusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas bangsa Indonesia*. *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 20(4), 478–492.
- Nata, A., Sofyan, A., Zuhdi, M., Musfah, J., Royani, A., Kamil, M., ... Khadijah, S. (n.d.). *Pendidikan Guru Indonesia Praktik dan Kebijakan*. Jakarta: FITK UIN Jakarta.
- Prayudi, G. M., & Salindri, D. (2015). *Pendidikan pada masa pemerintahan kolonial belanda di Surabaya tahun 1901-1942 (Education on Dutch Government in Surabaya at 1901-1942)*. *Publika Budaya*, 3(1), 20–34.
- Purnamasari, N. I. (2016). *Konstruksi sistem pendidikan pesantren tradisional di era global; paradoks dan relevansi*. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, 6(2), 73–91.
- Sewang, A. (2015). *Manajemen Pendidikan*. Wineka Media.
- Stamboel, K. A. (2013). *Panggilan Keberpihakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sukmana, W. J. (2021). *Metode penelitian sejarah*. *Seri Publikasi Pembelajaran*, 1(2), 1–4.
- Sultani, Z. I. M., & Kristanti, Y. P. (2020). *Perkembangan Dan Pelaksanaan Pendidikan Di Zaman Kolonial Belanda Di Indonesia Abad 19-20*. *Jurnal Artefak*, 7(2), 91–106.
- Susiana, S. (2015). *Pembangunan berkelanjutan: dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan*. P3DI Setjen DPR.
- Tantowi, H. A. (2022). *Pendidikan Islam di era transformasi global*. PT. Pustaka Rizki Putra.
- Tuahuns, Z. W. (n.d.). *Studiefonds: dermasiswa untuk pendidikan Pelajar pribumi masa kolonial tahun 1900-1930*. Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Wasino, M., & Endah Sri, H. (2018). *Metode penelitian sejarah: dari riset hingga penulisan*.